

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- ABSTRAK** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penataan kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan. Peraturan ini mengatur penyusunan informasi jabatan dan peta jabatan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi jabatan guna menetapkan nilai dan kelas jabatan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah; Peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara dan manajemen kepegawaian.
- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Informasi Jabatan dan Peta Jabatan yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati; Evaluasi Jabatan sebagai dasar penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan; Ketentuan pencabutan peraturan sebelumnya yang mengatur materi sejenis.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan menjadi pedoman dalam penataan kebutuhan jabatan serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan.
- II Lampiran 345 hal